

Daftar Pustaka

Buku

- Andrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Bandung: Citra Aditya, 1994).
- S. F. Marbun dan Moh Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2006).
- HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).
- E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar, 1957).
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Y. Sri Pudyatmoko, *Masalah Perizinan dan Upaya Pembenahan*, *google books*, 27 Maret 2024.
- Ridwan HR, *Op.Cit.*
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007).
- _____. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, (Medan, 2011).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2019).
- Jhony Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011).
- Muhaimin, *Op.Cit.*

- Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian (Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian)*, Cetakan Ke-2, (Malang: UIN Maliki, 2010).
- L. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hal.
- H Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007).
- S.J. Fockema Andreae, dikutip dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007).
- Bagir Manan, dikutip dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007).
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press dan PT Syaami Cipta, X).
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya, 2004).
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan, Op.Cit.*
- Tim Connor dan Fiona Haines, “Networked Regulation as a Solution to Human Rights Abuse in Global Supply Chains? The Case of Trade Union Rights Violations by Indonesian Sports Shoe Manufactures”, *Theoretical Criminology*, Edisi No. 17 Tahun 2013.
- Mohamad Mova Al’Afghani, *Legal Frameworks for Transparency in Water Utilities Regulation: A Comparative Perspective*, (Routledge, 2016).
- Bronwen Morgan dan Karen Yeung, *An Introduction to Law and Regulation Text and Materials*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2007).
- Mohamad Mova Al’Afghani dan Bisariyadi, *Ibid.*
- Diani Sadiawati et al., *Strategi Nasional Reformasi Regulasi, Mewujudkan Regulasi Yang Sederhana Dan Tertib*, (2015).
- Barda Nawawi Arif, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: X, 2011).
- Mubyarto dan Edy Suandi Hamid, *Meningkatkan Efisiensi Nasional*, (Yogyakarta: BPFE, 1987).

- Fransiska Xaverius Sadikin, *Tip dan Trik Meningkatkan Efisiensi, Produktivitas, dan Profitabilitas*, (Yogyakarta: ANDI, 2005).
- Ibnu Syamsi, *Sistem dan Prosedur Kerja*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).
- Mochtar Kusumaatmadja, di dalam Otje Salman dan Eddy Damian, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2002).
- Ramli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Bandung: Fikahati Aneska, 1996).
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, (McGraw-Hill: Yale University Press, 1964).
- Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*, Makalah, (Surabaya: Universitas Airlangga, 1995).
- Bagir Manan, “Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945”.
- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2011).

Jurnal

- Ateng Syafrudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”, *Jurnal Pro Justisia*, Edisi No. IV Tahun 2000.
- Antik Bintari, “Formulasi Kebijakan Pemerintah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta di Provinsi DKI Jakarta”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Edisi No. 2 Tahun 2016.
- Siti Hardianti Rukmana Manurung, “Strategi Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru dalam Meminimalisir Permasalahan Tumpang Tindih Sertifikat Tanah (Overlapping) di Kota Pekanbaru”, *Jurnal JOM FOSIP*, Edisi No. 4 Tahun 2017.
- Triana Rejekiingsih, “Asas Fungsi Sosial Hal Atas Tanah Pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan dari Teori, Yuridis, dan Penerapannya di Indonesia)”, *Jurnal Yustisia*, Edisi No. 2 Tahun 2016.

- Ratih Dita Rohalin dan Nur Laila Meilani, “Implementasi Kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Bukittinggi”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Edisi No. 7 Tahun 2023.
- Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*, Makalah, (Surabaya: Universitas Airlangga, 1995).
- Arnoldus Josua Malik Manurung, “Tinjauan Yuridis Terhadap Izin Mendirikan Bangunan Pasar Tradisional Di Kabupaten Garut, Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 50/G/2014/PTUN-BDG JUNCTO 55/B/2015/PT.TUN.JKT”, Skripsi, (Bandung: Universitas Komputer Indonesia, 2020).
- Zulva Noormaula dan Arief Firmanto, “Analisis Perencanaan Struktur Gedung Disperindagkop Kota Cirebon”, *Jurnal Konstruksi*, Edisi No. VII Tahun 2018.
- Hisar Sitohang, dkk., “Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi dengan Penyalahgunaan Jabatan dalam Bentuk Penyuapan Aktif”, *Jurnal Hukum*, Edisi No. 07 Tahun 2018.
- Candra dan Surya Dinata, “Analisis Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Dengan Menggunakan Aplikasi SIMBG di Dinas PUPR Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022”, *Jurnal Perangkat Lunak*, Edisi No. 4 Tahun 2022.
- Tatu Afifah, “Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Dalam Rangka Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten di Kabupaten Serang”, Tesis, (Depok: Universitas Indonesia, 2010).
- Koto Ismail dan Ida Hanifah, “Problema Hukum Seputar Tunjangan Hari Raya di Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Yuridis*, Edisi No. 8 Tahun 2021.
- Mohamad Mova Al’Afghani dan Bisariyadi, “Konsep Regulasi Berbasis Risiko: Telaah Kritis dalam Penerapannya pada Undang-Undang Cipta Kerja”, *Jurnal Konstitusi*, Edisi No. 18 Tahun 2021.
- A. Syamsu Alam, “Analisis Kebijakan Publik Kebijakan Sosial di Perkotaan Sebagai Sebuah Kajian Implementatif. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan”, Edisi No. 1 Tahun 2012.
- Desi Kumala Sari dan Tamsil, “Penegakan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pada Bangunan Gedung Milik PT Sipoa Group di Kabupaten Sidoarjo”, *Novum Jurnal Hukum*, Edisi No. 4 Tahun 2017.

Mendra Wijaya dan Syafhendry, “Persetujuan Bangunan Gedung: Inovasi Kebijakan atau Involusi Kebijakan?”, *Public Policy: Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis*, Edisi No. 4 Tahun 2023.

Sumber internet lainnya

Anonim, ”UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2007”, *kemenkeu.go.id*, 5 Oktober 2023.

Anonim, “FGD Prosedur Bangunan Gedung (FBG) Menggantikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)”, *kemenkeu.go.id*, 5 Oktober 2023.

Anonim, “PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2005”, *kemenkeu.go.id*, 5 Oktober 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Regulasi”, *kbbi.web.id/regulasi*, 5 Mei 2024.

Bappenas, “Menteri Bambang Sampaikan Agenda Reformasi Regulasi: Tata Fungsi Dan Kelembagaan Sistem Peraturan Perundangan Indonesia”, *bappenas.go.id*, 5 Mei 2024.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Yogyakarta, “Syarat Bangunan Gedung”, *yogyakarta.bpk.go.id*, 17 April 2024.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, “Persetujuan Bangunan Gedung”, *simbg.pu.go.id*, 17 April 2024.

Renata Chistha Auli, “Pengertian PBG dan Sanksi Jika Bangunan Tak Memilikinya”, *hukumonline.com*, 18 April 2024.

Alivia Putri Winata, “Apa Saja Perbedaan IMB dan PBG”, *kfmap.asia.com*, 19 April 2024.

Indonesia.go.id, “Mengenal Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB)”, *indonesia.go.id*, 19 Mei 2024.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, “Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)”, *sipn.menpan.go.id*, 27 Mei 2024.

Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat, “Persetujuan Bangunan Gedung”, *simbg.pu.go.id*, 27 Mei 2024.